

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP  
BELANJA MODAL  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera  
Barat Periode 2011 - 2014)**

**Oleh :**  
**Said Ridho Fadillah**  
**Pembimbing : Enni Savitri dan Rofika**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia*  
Email : [saidridhofadillah@yahoo.com](mailto:saidridhofadillah@yahoo.com)

*The Influence Of Local Revenues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and  
the Revenue Sharing Fund of Capital Expenditure  
(An Empirical Study On District / Municipal Governments In The Province Of West  
Sumatera)*

**ABSTRACT**

*This research aims to test empirically the influence of Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and the Revenue Sharing Funds to Capital Expenditures. The population used in this study is the Regional Government of West Sumatra Province. With 12 districts / municipal being sampled. The sampling technique is Purposive Sampling. Data collection was carried out from the Local Budget (APBD) Realization Report from 2011 to 2014, obtained from the Directorate General of Fiscal Balance of Regional Government. The method of analysis in this study using multiple linear regression method with SPSS version 21. The results of this study prove that the local revenue has no effect on capital expenditure, this is because PAD is more widely used to finance routine / operational expenditure. General allocation funds have no effect on capital expenditures, because DAU is a block grant whose use is handed over to regions in accordance with local priorities and needs. Special allocation funds have a positive effect on capital expenditure, because DAK is specific purpose grant in accordance with national priorities. Revenue-sharing funds have a positive effect on capital expenditure, because DBH is used for the development of regional facilities and infrastructure.*

*Keyword : Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund,  
Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure*

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan

kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya diharapkan pemerintah daerah meningkatkan investasi belanja modal sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kualitas pelayanan publik. Seharusnya pemerintah yang pada hakikatnya untuk memberikan pelayanan publik sudah pasti menyusun anggaran belanjanya dengan lebih memfokuskan kepada sektor yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat yakni meningkatkan alokasi belanja untuk sarana dan prasarana dalam hal ini alokasi pada belanja modal.

Koran Sindo Daerah edisi 14 Januari 2016 menginformasikan tiga daerah di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Langkat, Kota Pematangsiantar Dan Kabupaten Karo tercatat menduduki peringkat teratas se Indonesia dengan penggunaan APBD terbesar untuk porsi belanja pegawai. Kondisi ini sangat memprihatinkan, seharusnya pemerintah mulai dari tingkat daerah

hingga pemerintah pusat konsisten mengurangi porsi belanja pegawai dan mengalihkan menjadi belanja produktif dan berkualitas. Hal ini membuktikan pengalokasian belanja pemerintah belum mencerminkan untuk kesejahteraan masyarakat yang mana tergambar dari porsi belanja pegawai yang lebih besar dibandingkan belanja modal yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut juga dapat terlihat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2011 – 2014.

Hanya 1 kabupaten yang mampu mengalokasikan Belanja Modalnya sesuai dengan yang diatur dalam PP No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014. Dalam PP tersebut pemerintah daerah diwajibkan sekurang – kurangnya mengalokasikan belanja modal dalam APBD pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yakni, 26%, 27%, 28%, 29% dan terakhir pada tahun 2014 adalah 30% dari belanja daerah. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah sulit mencapai apa yang diamanatkan dalam PP tersebut.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah didapat dari sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan Suprayitno (2015), menemukan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Karna semakin tinggi PAD yang diterima oleh pemerintah Provinsi berpengaruh terhadap

meningkatnya jumlah belanja modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012).

Namun tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004).

Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Penelitian Sugiardi (2014) menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, sejalan dengan Sulistyowati (2011) dan Setiawan (2013).

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004).

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi

pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Jiwatami (2013) menemukan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sama halnya dengan yang ditemukan oleh Sugiyanta (2016).

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang terakhir adalah Dana Bagi Hasil. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 33/2004). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Jiwatami (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan DBH terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang diatas serta penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian ini adalah: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal" (Studi Empiris pada

Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2011-2014).

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Agency Theory**

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal dimana dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang (Halim dan Abdullah, 2006).

### **Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif,

legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

### **Belanja Modal**

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (UU 32/2004).

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan

fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (UU 32/2004).

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus (UU 32/2004).

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 33 tahun 2004).

Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertical sekaligus memberikan akses yang lebih besar kepada Daerah

terhadap sumber - sumber penerimaan yang relatif cukup besar.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah itu sendiri. Dimana semakin besar pendapatan disuatu daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah tersebut. Karna pemerintah daerah yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang luas untuk menggunakan sumber - sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Dengan tujuan pemerintah yang pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakatnya, seharusnya pendapatan daerah tersebut harus dialokasikan kepada belanja daerah yang dapat menambah sarana dan prasarana yang langsung dapat manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Yakni dialokasikan kepada belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kualitas pelayanan publik. Mayasari (2014) menemukan Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sejalan Sugiardi (2014).

Berdasarkan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Dengan adanya DAU diharapkan pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan yakni dialokasikan untuk belanja modal sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang luas untuk menggunakan sumber - sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Sehingga semakin besar DAU yang diterima daerah diharapkan semakin besar pula belanja modalnya. Penelitian Suprayitno (2015) dan Setiawan (2013) menunjukkan hasil bahwa variable dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan

prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011). Sejalan dengan Pelealu (2013). Yang menemukan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

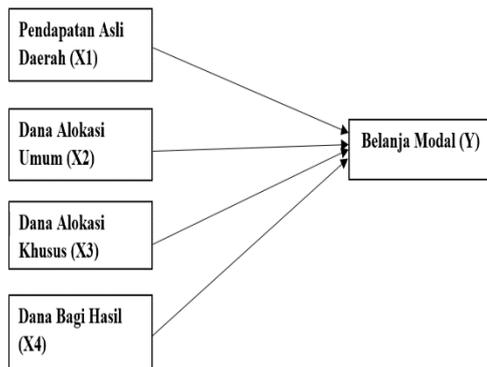
### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**

Dengan adanya DBH dapat menambah sumber pendapatna daerah yang mana akan membantu pemerintah daerah untuk membiyai kebutuhannya. Sehingga pendapatan daerah dari dana bagi hasil sangat dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka semakin besar DBH yang didapat suatu daerah maka daerah tersebut cenderung memiliki belanja modal yang besar pula dikarenakan pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan yang didapat dari dana perimbangan tersebut. Penelitian Sugianta (2016) menemukan DBH berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



**Sumber :** *Data Olahan, 2017*

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 – 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Sehingga didapat 12 kabupaten / kota yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

### Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Variabel Dependen

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel belanja modal dapat diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin

+ Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya (PP 71/2010).

### Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (UU 33/2004). Variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus:

$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.$

### Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut:

$DAU = Cellaah Fiskal + Alokasi Dasar$   
 $Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal (UU 33/2004).$

### Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011).

### Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pengukurannya diukur dengan:

DBH = Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil Sumber daya alam (UU 33/2004).

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan SPSS versi 21. Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien

Regresi

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

X3 = Dana Alokasi Khusus

X4 = Dana Bagi Hasil

e = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

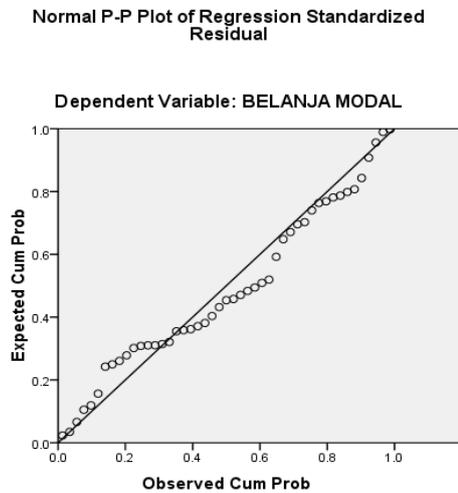
Berdasarkan data yang diperoleh merupakan hasil dari jumlah sampel laporan realisasi APBD selama 4 tahun yaitu dari tahun 2011 – 2014 sehingga jumlah sampel laporan tahunan berjumlah 48 laporan tahunan. Namun berdasarkan hasil uji statistik deskriptif ada 1 sampel yang di outlier dikarenakan 1 sampel dari data ini, muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan dalam pengujian ini berjumlah 47 laporan realisasi APBD.

### Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang datanya terdistribusi dengan normal atau mendekati normal. Distribusi normal didalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis *normal probability plot*. Pada uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau

dengan melihat histogram residualnya. Dibawah ini hasil Grafik Normal *Probability Plot* yang diolah dengan SPSS sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Scatterplot**



Sumber: *Data Olahan, 2017*

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**  
**Hasil Uji Autikorelasi**

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Umumnya untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan uji *Durbin-Watson* dengan ketentuan Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi pada penelitian ini adalah 1.673 dan nilai tersebut termasuk diantara nilai DW -2 sampai +2, yang berarti tidak ada autokorelasi.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai *Tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10. Hasilnya diperoleh nilai *Tolerance* dan VIF sebagai pengujian multikolinieritas sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	.307	3.261
DAU	.119	8.375
DAK	.222	4.496
DBH	.348	2.877

Sumber: *Data Olahan, 2017*

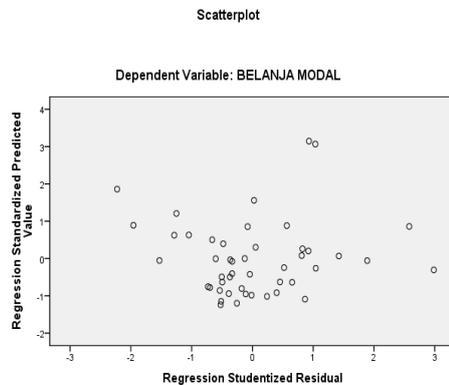
Dari Tabel 1 menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

Tetapi jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3 berikut:

**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot**



**Sumber:** *Data Olahan, 2017*

Dari grafik scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Berganda

Hasil uji analisis regresi berganda sebagai berikut: Dari pengolahan data komputer program SPSS, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	15696.427	16942.131	

Pendapatan Asli Daerah	.173	.206	.129
Dana Alokasi Umum	-.063	.082	-.188
Dana Alokasi Khusus	1.352	.477	.511
Dana Bagi Hasil	3.494	.902	.558

**Sumber:** *Data Olahan, 2017*

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 15696.427 + (0.173) X_1 + (-0.063) X_2 + (1.352) X_3 + (3.494) X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah
- X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum
- X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Khusus
- X<sub>4</sub> = Dana Bagi Hasil

### Hasil Uji Dan Pembahasan

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Regresi**

Model	t	Sig.
(Constant)	.926	.359
Pendapatan Asli Daerah	.843	.404
Dana Alokasi Umum	-.762	.450
Dana Alokasi Khusus	2.835	.007
Dana Bagi Hasil	3.872	.000

**Sumber:** *Data Olahan, 2017*

### Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai Thitung 0.843 < Ttabel 1.682, Ttabel ( $\alpha = 0,05$  dan  $df=42$ ) dan signifikansi sebesar  $0.404 > \alpha = 0,05$ .

Maka dapat disimpulkan hipotesis H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak

yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Seharusnya kabupaten / kota yang memiliki PAD besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang besar pula. Akan tetapi pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten / kota dengan PAD yang besar akan cenderung terkadang tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin / belanja operasional. Yang mana PAD tersebut banyak dihabiskan untuk belanja konsumtif pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yovita (2011) dan Indiyani (2013) yang menemukan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### **Hasil Pengujian Hipotesis Kedua**

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai  $T_{hitung} -0.762 < T_{tabel} 1.682$ ,  $T_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 42)$  dan signifikansi sebesar  $0.450 > \alpha = 0,05$ . Maka dapat disimpulkan hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat terlihat dari alokasi belanja modal dan lebih digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah yang bersifat oprasional atau rutin.

Hasil ini dikarenakan Dana Alokasi Umum yang merupakan

transfer bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Karna sifatnya yang "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah, hal tersebut justru membuat DAU yang diterima oleh daerahnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswantoro (2012) dan Indiyani (2013).

### **Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai  $T_{hitung} 2.835 > T_{tabel} 1.682$ ,  $T_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 42)$  dan signifikansi sebesar  $0.007 < \alpha = 0,05$ . Maka dapat disimpulkan hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Ini mengindikasikan bahwa dana alokasi khusus yang selama ini diterima daerah digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat terlihat dari alokasi belanja modal. Dimana daerah yang menerima DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bila belanja modal akan sangat

dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK.

Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal karena bersifat sebagai specific purpose grant dimana penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dimana specific purpose grant menjadi alat yang lebih efektif pemerintah pusat untuk menyalurkan perbaikan infrastruktur lokal dengan preferensi prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini dapat terlihat dari semakin besarnya DAK yang diperoleh daerah maka semakin besar pula belanja modal daerah tersebut.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sianipar (2011) dan Pelealu (2013).

#### Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai  $T_{hitung} 3.872 > T_{tabel} 1.682$ ,  $T_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df=42)$  dan signifikansi sebesar  $0.000 < \alpha = 0,05$ . Maka dapat disimpulkan hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hasil ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil yang selama ini diterima daerah digunakan untuk pembangunan daerah yang dapat terlihat dari alokasi belanja modal dan juga menjelaskan bahwa kabupaten / kota yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang

kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH.

DBH yang merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. Dikarenakan kebutuhan dasar pemerintah seperti belanja operasional / rutin telah ditutupi oleh sumber pendapatan daerah dari PAD, DAU dan DAK, maka Dana Bagi Hasil dapat sepenuhnya digunakan untuk Belanja Modal untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah. Sejalan dengan dengan teori dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Sugiyanta (2016).

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
Model Summaryb

R Square	Adjusted R Square
.696	.667

Sumber: Data Olahan, 2017

Adjusted R Square sebesar 0.667 atau 66.7%. Hal ini berarti variabel-variabel independen yang meliputi pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mempengaruhi belanja modal sebesar 66.7%. Sedangkan sisanya sebesar 33.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin / belanja operasional.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer bersifat umum (block grant), yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, lebih banyak dihabiskan untuk belanja rutin / belanja operasional.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini karena Dana Alokasi Khusus bersifat (specific purpose grant) dimana penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan dasar

masyarakat yang dialokasikan dalam belanja modal.

4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan kebutuhan dasar pemerintah seperti belanja operasional / rutin telah ditutupi oleh sumber pendapatan daerah dari PAD, DAU dan DAK, maka Dana Bagi Hasil dapat sepenuhnya digunakan untuk Belanja Modal yaitu digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan yang terdapat didalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah sampel pada penelitian ini tergolong kecil yaitu hanya sebanyak 12 Kabupaten / Kota dan yang hanya ada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian ini menemukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil dapat menjelaskan variabel Belanja Modal sebesar 66.7%. Sedangkan sisanya sebesar 33.3% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan adalah:

1. Jumlah sampel yang dipilih sebaiknya lebih banyak agar dapat menunjukkan interpretasi hasil yang lebih memuaskan dikarenakan jumlah sampel yang banyak.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Belanja Modal, diharapkan dapat menambahkan variabel dari Non Keuangan. Misalnya Kebijakan

Pemerintah Daerah yang mungkin dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar pengaruhnya terhadap belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariasi Dengan Program SPSS, Edisi 4, Diponegoro, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2009. Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta, Salemba Empat
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013.
- Mayasari, Luh Putu Rani. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Akuntansi. Universitas Pendidikan Gahesha.
- Pelealu, A. M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus DAK, Dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 14.
- Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. \_\_\_\_\_, 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_, 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_, 2010. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014.
- \_\_\_\_\_, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Setiawan, Bowo.2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Study Empiris Kabupaten/ Kota Jawa Tengah).
- Sugiarthi.2014. Pengaruh Pad, Dau, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.
- Sugiyanta.2016. Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia.
- Sulistiyowati.2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Suprayitno, Bambang.2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
- [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id)
- [www.koransindo.co.id](http://www.koransindo.co.id)